KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Terburuk, Kinerja Legislasi DPR Periode 2014-2019
Tanggal : Kamis, 08 Februari 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

Terburuk, Kinerja Legislasi DPR Periode 2014-2019

[JAKARTA] Kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 dinilai paling buruk dibandingkan periode-periode sebelumnya. Kinerja buruk di bidang legislasi tersebut diperparah dengan lemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah.

DPR terjebak dalam upaya membangun benteng pertahanan bagi diri sendiri dan partai politik. "Kinerja DPR saat ini merupakan yang terburuk jika dibandingkan dengan DPR periode 2009-2014. Masih kalah jauh," ujar peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada *SP* di Jakarta, Kamis (8/2).

Dikatakan, pada tahun pertama menjabat, para anggota DPR periode 2009-2014 menghasilkan 8 RUU, sementara DPR periode ini hanya 3. Pada tahun kedua, DPR periode lalu berhasil menghasilkan 12 RUU, sementara yang sekarang hanya 10 RUU. Lalu, pada tahun ketiga, DPR periode terdahulu mengesahkan 10 RUU, sementara DPR periode sekarang hanya 6 RUU.

"Dari data itu saja, tampak jelas kemerosotan kinerja DPR periode 2014-2019. Tak hanya jika dibandingkan dengan DPR periode terdahulu, tetapi juga jika membandingkan grafik pencapaian RUU tahunan mereka, yang tidak pernah berhasil lebih dari 10 RUU prioritas setiap tahunnya. Jadi, ini juga terkait kapasitas," ujar dia.

Kinerja buruk di bidang legislasi tersebut, menurut Lucius, diperparah dengan lemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. DPR, kata dia, terjebak dalam upaya membangun benteng pertahanan bagi diri sendiri dan partai politik.

"Hak-hak istimewa DPR, seperti Hak Angket, justru digunakan untuk melawan upaya institusi lain, seperti KPK, dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga yang terlihat dalam Pansus Pelindo II yang ujung-ujungnya justru hanya menghasilkan rekomendasi yang tidak bisa dieksekusi," kata dia.

Menurut Lucius, fungsi anggaran juga tak kalah parahnya. Beberapa kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa DPR masih memanfaatkan celah kekuasaan mereka di bidang anggaran justru untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka melalui cara-cara yang koruptif.

Lucius kemudian mengungkapkan sejumlah penyebab buruknya kinerja DPR. *Pertama*, kata dia, DPR tersandera pada kepentingan kelompok masing-masing untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka tidak lagi serius memperbaiki kinerja, tetapi sibuk bertikai merebut kursi pimpinan.

"Bahkan, karena dianggap sebagai posisi strategis, kursi Ketua DPR, misalnya, terus saja menjadi isu hangat dan telah terjadi beberapa kali pergantian. Urusan figur Ketua DPR ini saja sudah menyedot energi DPR, karena setiap ketua DPR baru selalu muncul dengan program-program baru yang ternyata hanya semacam janji politik saja," kata dia.

Kedua, kata Lucius adalah kelemahan regulasi yang mengatur kerja DPR. Dia mencontohkan, lemahnya pembatasan waktu pembahasan RUU sehingga sering ada RUU yang diperpanjang pembahasannya.

"Anehnya, DPR menikmati aturan ini karena meringankan mereka. Padahal, efek lain dari perpanjangan proses pembahasan legislasi adalah anggaran yang terus tersedot untuk pembahasan satu RUU. Lalu, terus bertambahnya anggaran ternyata juga tak mampu menggenjot semangat DPR untuk segera menyelesaikan RUU yang dibahas," ujar dia.

Pertegas Komitmen

Dalam rangka memperbaiki kinerja DPR, Lucius menganjurkan beberapa hal. Pertama, DPR perlu mempertegas kembali komitmen atau kemauan politik untuk memperbaiki diri. Pasalnya, solusi apa pun yang dibuat sulit dilaksanakan jika DPR tidak mau berubah. "Semuanya menjadi sia-sia ketika DPR sendiri memang tidak mau berubah, tidak mau bekerja maksimal, dan tidak mau serius menjadi representasi rakyat," kata dia.

Kedua, secara teknis, semestinya DPR bisa mengukur sejak awal kemampuan mereka bekerja melalui pembuatan rencana yang masuk akal. DPR seharusnya lebih realistis dan tidak perlu mengusulkan target yang ambisius. "Jangan memajang banyak rencana sekadar untuk menghiasi dokumen perencanaan. Buat rencana realistis, yang akan membuat mereka juga bisa relaks dalam mengerjakannya," katanya.

Ketiga, Lucius meminta komitmen partai melalui fraksi-fraksi untuk mengingatkan dan menegur anggota-anggota mereka agar bekerja maksimal. Fraksi atau partai jangan justru menjadi pelindung untuk berbagai penyimpangan dan pelanggaran disiplin anggota. "Itu yang selama ini terjadi, yang mengakibatkan kualitas kinerja DPR selalu buruk. Partai melalui fraksinya gagal menjadi lembaga kontrol bagi anggota-anggota mereka," ujar Lucius.

Dikatakan pula, pada tahun politik ini, optimisme terhadap DPR dalam mengukir prestasi kinerja yang lebih baik harus dikubur dalam-dalam. Sebab, ujarnya, tenaga sebagian anggota DPR sudah harus terbagi oleh hajatan pemilihan kepala daerah di 171 daerah di seluruh Indonesia.

Menurut Lucius, kepentingan partai-partai untuk memenangkan Pilkada Serentak 2018 tidak bisa disangkal lagi. Partai pasti menganggap Pilkada Serentak 2018 sebagai pertarungan pembuka jalan menuju kemenangan pada Pemilu 2019. "Belum lagi kenyataan bahwa sejumlah anggota DPR terlibat sebagai calon kepala daerah dan yang lainnya menjadi tim pemenangan," ujarnya.

Kondisi tersebut tentu saja berpengaruh pada kosentrasi DPR dalam mengikuti kegiatan-kegiatan atau persidangan-persidangan yang dilakukan di DPR. Jika persidangan mulai sepi dari kehadiran anggota, maka sulit mengharapkan bahwa mereka akan bisa menghasilkan produk perundangan sesuai dengan yang direncanakan.

"Pembahsan RUU selalu mengandaikan kehadiran semua anggota agar prosesnya bisa lebih mudah dengan mendengar masukan yang lengkap dari setiap fraksi. Tetapi, jika kesibukan di pilkada sedang tinggi, bagaimana kita mengharapkan anggota DPR bisa konsisten mengikuti pembahasan RUU di DPR, sementara kontestasinya di daerah?" ujarnya.

Merosot

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris juga mengatakan bahwa kinerja DPR, terutama dalam fungsi legislasi, semakin merosot menjelang Pemilu 2019. Hal ini menimbulkan keprihatinan. Seluruh elemen masyarakat sepatutnya menyoroti aspek rendahnya kuantitas sekaligus kualitas legislasi.

"Melihat merosotnya kinerja DPR menjalankan fungsi legislasi, tentu kita sedih dan prihatin. Publik dan media mesti 'menggonggong'. Bersuara. Tidak bisa diam," kata Syamsuddin kepada *SP* di Jakarta, Kamis (8/2).

Dikatakan, padatnya agenda pada tahun politik memang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya produk UU yang dihasilkan DPR bersama pemerintah. "Bagaimana pun, di tahun politik ini, fokus perhatian anggota dewan lebih kepada persiapan Pemilu 2019 ditambah pilkada serentak pada Juni 2018," tuturnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan tahapan Pemilu 2019 seperti dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD dijadwalkan pada 4-17 Juli 2018. Sementara, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada 4-10 Agustus 2018. Masa kampanye dimulai pada 23 September 2018-13 April 2019.

Syamsuddin menyatakan, permasalahan fungsi legislasi DPR begitu kompleks. Menurutnya, sistem pemilu, parpol, termasuk seleksi calon anggota legislatif, tidak menjanjikan lahirnya wakil rakyat yang akuntabel serta bertanggung jawab. "Partai juga tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan publik melalui legislasi. Memang kompleks masalahnya," ujarnya.

Dia mengungkapkan, UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu merupakan contoh buruknya kualitas suatu regulasi. Padahal, kualitas UU Pemilu menentukan hasil dari pemilu. [YUS/C-6]

Kinerja Legislasi DPR 2017

